GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 16 November 2007**

Subyek : penghijauan **Hari : jumat**

Halaman : 13

Indonesia Lakukan

Penyebaran Penyakit Meluas

Denpasar, Kompas - Menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak Ke-13 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Indonesia menggelar berbagai acara yang bernuansa prolingkungan.

Di Kota Tegal, Jawa Tengah, akan ditanam 1.500 cemara laut di sepanjang pantai, pekan ini, untuk menahan laju abrasi.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tegal Agus Santoso seusai diskusi kampanye perubahan iklim di Tegal, Rabu (14/11) malam. Penanaman dilakukan di pantai Kelurahan Panggung dan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur. Sebanyak 1.500 pohon cemara laut itu adalah bantuan dari PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Tegal.

Menurut kondisinya, penggerusan dipengaruhi bentuk pantai di Tegal yang menyerupai teluk. Selain ditanami bakau, juga bisa dengan membangun fisik seperti groin. Groin di pantai berfungsi memperkecil ombak dan menangkap pasir. Tahun ini dipasang groin sebanyak 20 batang.

Sementara penanaman bakau dilakukan dengan menanam pohon baru dan menyulami tanaman yang rusak. Pada Juli lalu, sebanyak 7.500 pohon cemara laut ditanam di kawasan pantai Kota Tegal. Namun, penanaman masih terkendala iklim dan cuaca masih dominan.

Sementara itu, di Bali siap ditanami bakau, demikian dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I Made Sulendra di Denpasar, Kamis (15/11). Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk dukungan pada pelaksanaan Konferensi Para Pihak Ke-13 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Dengan program itu, Bali mencapai target penanaman pohonnya sebanyak 5.685.000 batang—berbagai bibit pohon.

Dampak pada kesehatan

Ketua Kajian Kesehatan Lingkungan Ikatan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Budi Haryanto pada acara diskusi "Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Masyarakat" mengatakan, "El-Nino, fenomena alam di lautan Pasifik, telah memberi kontribusi terhadap penyebaran penyakit malaria, demam berdarah, diare, kolera, encephalitis, dan penyakit akibat vektor lainnya," katanya kemarin.

Tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, penyakit-penyakit tersebut juga terjadi di negara-negara yang telah maju. Ironisnya, negara berkembang yang lebih sedikit kontribusinya dalam pemanasan global justru paling rentan terjangkit penyakit.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Hal senada disampaikan Patra M Zen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut dia, bisa saja PT Lapindo membuat beberapa klaim, seperti semburan lumpur di Porong bukan karena pengeboran atau para korban diperlakukan layak.

"Namun, masyarakat sudah tahu apa yang sesungguhnya terjadi," kata dia.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengungkapkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan tim untuk mengevaluasi dampak luberan lumpur PT Lapindo. "Ada kerusakan lingkungan yang menyebabkan hak-hak warga, seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan, dan hak atas kesejahteraan, terlanggar," kata Ifdhal.

Belum dibayar

Pemilik 11 perusahaan korban lumpur Lapindo, Kamis, memblokir upaya penebalan tanggul kolam lumpur di Desa Ketapang, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena Lapindo tak kunjung membayar ganti rugi.

Pemblokiran itu dilakukan sekitar pukul 09.00 dengan memasang palang dari kayu di akses masuk menuju kolam lumpur di Ketapang atau tanggul yang berada di sekeliling pabrik PT Oriental Samudera Karya (Osaka) yang sudah terendam lumpur.

Menurut Direktur PT Osaka, Johny Osaka, sepuluh hari yang lalu 11 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Luapan Lumpur Lapindo bertemu PT Minarak Lapindo Jaya dengan difasilitasi Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh.

Dalam pertemuan itu, pengusaha korban lumpur mau menurunkan kembali klaim ganti rugi yang diajukan 30 persen sampai 40 persen. Saat itu PT Minarak belum mengambil keputusan dan meminta waktu satu minggu.

"Satu minggu sudah lewat, tapi tak ada jawaban sehingga kami terpaksa unjuk rasa lagi karena kami sudah menunggu satu tahun lebih," kata Johny.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP